

# ANALISIS HUBUNGAN BELANJA PEMERINTAH FUNGSI PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO REGIONAL (PDRB)

Dahiri\* dan Marihot Nasution\*\*

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: \* [dahiridai@gmail.com](mailto:dahiridai@gmail.com), \*\* [marihot.nasution@dpr.go.id](mailto:marihot.nasution@dpr.go.id)

---

## **Abstract**

*Tourism is an industry sector that is being favored in Indonesia to increase economic growth. Nevertheless, the spending on tourism is allocated less than other spendings because of the limited fiscal space of the government. This study examines the relationship between the allocation of government spending on tourism and regional economic growth as measured by Gross Regional Domestic Product (GRDP/PDRB). The tests were conducted with data from 2010 to 2015 for all districts/cities in Indonesia. This is done to see the magnitude of the impact of government spending, especially on tourism, on economic growth.*

**Keywords: Government spending on tourism; GDRP/PDRB; Correlation Test**

---

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing. Kondisi kepariwisataan nasional tahun 2015 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 4,23 persen atau senilai Rp461,36 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai US\$11,9 milyar, dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12,16 juta orang (Kementerian Pariwisata, 2016).

Kementerian Pariwisata (2016) juga menyatakan bahwa pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 10,4 juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 255,20 juta perjalanan. Di sisi lain, salah satu indikator penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, berdasar penilaian WEF (*World Economic Forum*) posisi Indonesia juga meningkat signifikan dari ranking 70 dunia menjadi ranking 50 di tahun 2015.

Terkait peran anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, para penganut Keynesian percaya bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut dapat berupa peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak atau keduanya. Beberapa penelitian telah memberikan bukti empiris adanya pengaruh belanja pemerintah terhadap perekonomian sebuah negara atau daerah. Bataineh (2012), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di Jordan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP). Ambya (2014), menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pembangunan sangat bergantung pada kecukupan sumber pendapatan dan belanja pemerintah. Ambya menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan riil per kapita, kesehatan riil per kapita dan infrastruktur riil per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah otonom baru di Indonesia. Selain itu, Nurudeen dan Usman (2010), menyimpulkan bahwa belanja modal, pertanian, transportasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan inflasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Meskipun begitu, Bappenas dan UNDP (2008), meneliti 32 Daerah Otonom Baru (DOB) pada rentang waktu 2001–2007 diketahui bahwa pemekaran DOB tidak membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi daerah DOB itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi DOB masih lebih rendah dari daerah induk sebelum daerah tersebut menjadi DOB. Bappenas menyatakan bahwa daerah induk pada umumnya telah terdapat basis industri yang dapat mendorong perekonomian sebesar 12 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sementara DOB umumnya masih bergantung pada satu sektor basis dasar seperti pertanian, perkebunan maupun sektor dasar lainnya. Dikatakan bahwa semakin tinggi peran industri pengolahan dalam satu wilayah, maka semakin maju daerah tersebut. Bappenas menyimpulkan salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi DOB adalah dependensi fiskal pada pemerintah pusat. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa daerah yang memiliki lebih dari satu sektor basis akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibanding dengan daerah yang tidak memiliki sektor basis (Bappenas dan UNDP, 2007; Ambya, 2014). Dengan mengetahui sektor basis ekonomi dan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor basis maka pembangunan pemerintah bisa lebih terarah.

Dengan besarnya dampak pengeluaran pemerintah bagi ekonomi dan besarnya potensi sektor pariwisata bagi Indonesia secara umum maka perlu dikaji lebih jauh mengenai hubungan antara belanja/pengeluaran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah khususnya belanja/pengeluaran fungsi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

### 1.2. Rumusan Masalah.

Masalah yang akan dianalisis dalam penelitian yaitu adakah hubungan antara belanja fungsi pariwisata di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB.

### 1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara belanja fungsi pariwisata di daerah melalui APBD dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB.

## 2. Tinjauan Pustaka.

Pembangunan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berubah menjadi lebih baik. Pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2006) adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

### 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan *Gross National Product* (GNP) riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya.

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2000), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka panjang. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian

kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi pertumbuhan ekonomi Kuznets mempunyai tiga komponen, yaitu: pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, dan penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar penghitungan.

Sementara itu, PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000.

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui: a) tingkat pertumbuhan ekonomi; b) gambaran struktur perekonomian; c) perkembangan pendapatan per kapita; d) tingkat kemakmuran masyarakat; dan e) tingkat inflasi dan deflasi.

## **2.2. Pengeluaran/Belanja Pemerintah**

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Pada umumnya pengeluaran agregat dalam suatu periode

tertentu adalah kurang dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan *menciptakan full employment*.

Dalam Mankiw (2006), berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow, fungsi produksi sederhana dari teori ini adalah:

$$Y=aK$$

Dimana Y adalah output, a adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, sedangkan K adalah persediaan modal. Fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Modifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas dalam Barro dan Sala-i-Martin (1995) dinyatakan sebagai berikut:

$$Y=aL^{(1-\alpha)} G^{\alpha}$$

Dimana  $0 < \alpha < 1$  persamaan ini menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan pada *constant return to scale* pada input L dan K. Asumsinya adalah angkatan kerja agregat (L) adalah konstan. Modal (K) digantikan oleh pengeluaran pemerintah (G) berada pada *diminishing return* untuk modal agregat (K). Oleh karena itu, perekonomian berada pada kondisi pertumbuhan ekonomi endogen.

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (*aggregate demand* [AD]) adalah pengeluaran pemerintah. Dalam Mankiw (2006) dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangatlah penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan.

### 2.3. Teori Pengeluaran Pemerintah

- a. Model perkembangan pengeluaran pemerintah oleh Rostow-Musgrave.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar

akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Musgrave dalam Norista (2010) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

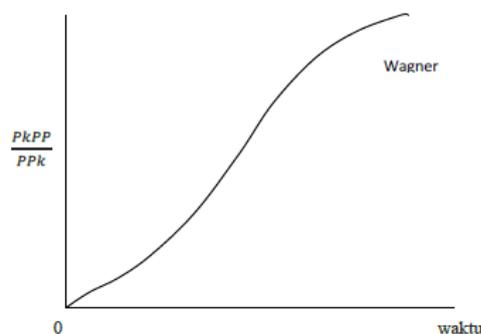
b. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “*The Law of Expanding State Expenditure*”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini, Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner ditunjukkan dalam persamaan di bawah, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk ekponensial. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP\ 1}{PPK\ 1} < \frac{PkPP\ 2}{PPK\ 2} < \dots < \frac{PkPP\ n}{PPK\ n}$$

Dimana PkPP: pengeluaran pemerintah per kapita; PPK: pendapatan per kapita; dan 1,2, ...,n : jangka waktu (tahun).

Gambar 1. Grafik Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

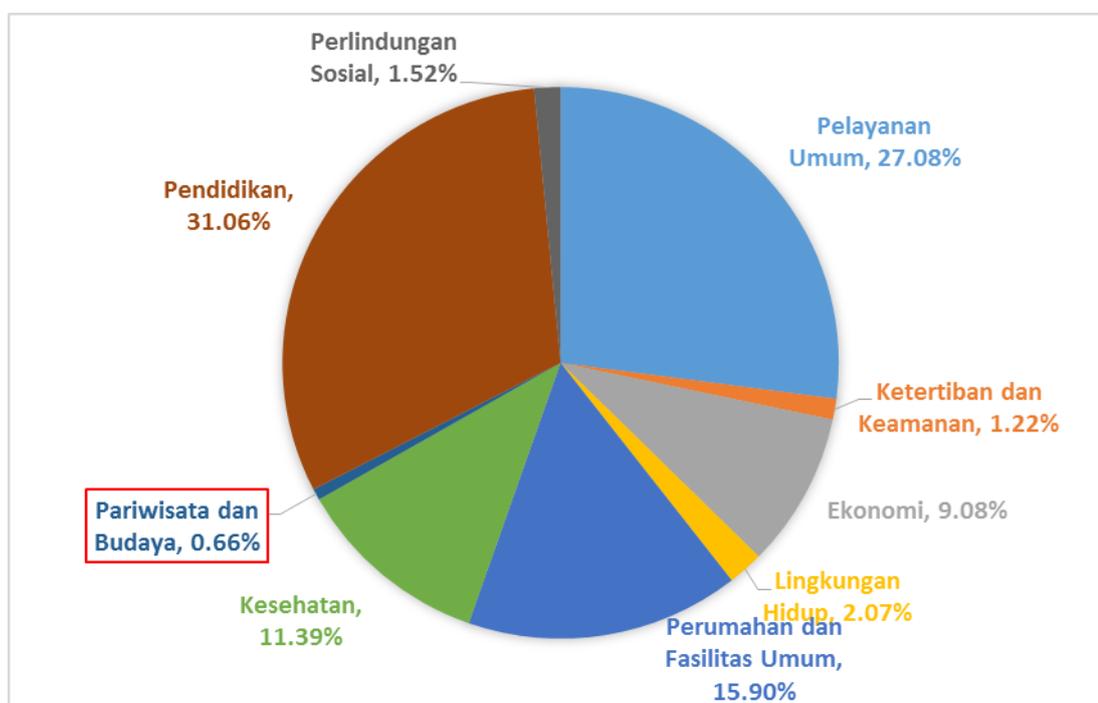


Sumber: Dumairy, 1996

## 2.4. Anggaran Belanja Pemerintah Fungsi Pariwisata

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah daerah dirinci ke dalam 9 fungsi, yang menggambarkan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi ketertiban dan keamanan; (3) fungsi ekonomi; (4) fungsi lingkungan hidup; (5) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (6) fungsi kesehatan; (7) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (8) fungsi pendidikan; dan (9) fungsi perlindungan sosial. Pada tahun 2015, anggaran pemerintah daerah mayoritas dialokasikan pada fungsi pelayanan publik dan pendidikan. Fungsi Pendidikan diutamakan karena merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa 20 persen belanja pemerintah dialokasikan untuk pendidikan. Sedangkan untuk fungsi pelayanan publik dikarenakan fungsi tersebut merupakan fungsi utama pemerintah bagi masyarakat.

Grafik 1. Sebaran Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi Tahun 2015



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 2017

Jika dibandingkan dengan belanja di fungsi lain, belanja fungsi pariwisata memang memang tergolong kecil (Gambar 2). Hal ini dikarenakan pemerintah masih fokus pada pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Sementara itu, belanja fungsi pariwisata tidak diarahkan bagi pelayanan publik di daerah yang bersangkutan melainkan pada upaya memanfaatkan potensi pariwisata bagi daerah tersebut.

Jika dilihat dari kebijakan yang diambil untuk sektor pariwisata tersebut, memang sebagian besar bukan merupakan pelayanan untuk publik, namun

dampak dari kebijakan tersebut diharapkan nantinya akan diterima bagi sektor ekonomi berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Pengumpulan Data dan Pengukuran Variabel

Studi ini menggunakan sampel seluruh pemerintah daerah kabupaten di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam studi ini adalah belanja pemerintah daerah untuk fungsi pariwisata dalam APBD serta PDRB yang menjadi variabel pertumbuhan ekonomi daerah. Data belanja fungsi pariwisata dalam APBD kabupaten/kota diperoleh dari publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan periode 2010-2015. Untuk data PDRB periode yang sama diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik.

#### 3.2. Metode Analisis Data

Dalam menguji hubungan antara belanja fungsi pariwisata dan PDRB, studi ini menggunakan analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana (*bivariate correlation*) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah metode Pearson atau sering disebut Product Moment Pearson. Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) berkisar antara 1 sampai -1, dimana nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun).

Rumus yang dipergunakan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana:

$n$  = Banyaknya pasangan data X dan Y

$\sum x$  = total jumlah dari variabel X

$\sum y$  = total jumlah dari variabel Y

$\sum x^2$  = kuadrat dari total jumlah variabel X

$\sum y^2$  = kuadrat dari total jumlah variabel Y

$\sum xy$  = hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y

Untuk memudahkan dalam pengujian, studi ini menggunakan bantuan software SPSS untuk mengukur nilai koefisien korelasi Pearson (r).

#### 4. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Dalam pengumpulan data, dari sampel yang diambil terkumpul 2096 pasang data yang merupakan data belanja fungsi pariwisata dan PDRB tiap kabupaten untuk periode 2010-2015. Data tersebut memiliki sebaran statistik sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Jumlah Data	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
<b>PDRB</b>	2096	0,21	365.073,00	14.814,191	27.318,84382
<b>Belanja Pariwisata</b>	2096	0,01	204,02	6,0586	8,38895

Sumber: BPS; 2017 dan DJPK, Kemenkeu; 2017, data diolah

Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa pengujian hubungan antara belanja fungsi pariwisata dan PDRB tiap kabupaten di Indonesia dilakukan dengan analisis korelasi sederhana. Hasil korelasi antara dua variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Korelasi Sederhana

<i>Korelasi Pearson</i>	<b>PDRB</b>	<b>Belanja Pariwisata</b>
<b>PDRB</b>	-	0.319
<b>Belanja Pariwisata</b>	0.319	-
<b>Signifikansi</b>	0.00000	0.00000

Sumber: Data diolah

Dari pengujian di atas diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi regional dengan belanja fungsi pariwisata dalam APBD pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi koefisien korelasi Pearson senilai 0,0000 (kurang dari 0,05). Hal ini menandakan meskipun belanja fungsi pariwisata lebih ditujukan pada peningkatan pemasaran dan kualitas destinasi pariwisata, ternyata kebijakan pemerintah di sektor pariwisata tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum. Hal ini merupakan keberhasilan tersendiri bagi pemerintah, meskipun terdapat beberapa daerah yang mengalami ketertinggalan dalam pembangunan namun belanja fungsi pariwisata dapat mendorong kemajuan ekonomi daerah, meskipun kemajuan tersebut tidak sepenuhnya didukung dari belanja fungsi pariwisata saja.

Hasil ini sebaiknya menjadi pedoman bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata dengan memperbanyak pemasaran wisata Indonesia baik pemasaran yang ditujukan ke dalam maupun luar negeri. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas destinasi wisata juga diperlukan agar wisata Indonesia tetap diminati oleh wisatawan. Untuk lebih mengoptimalkan dampak pariwisata bagi perekonomian daerah maupun nasional,

pemerintah sebaiknya juga memusatkan pembangunan bagi sektor pendukung seperti infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pengoptimalan industri pariwisata. Upaya tersebut diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi pariwisata Indonesia, yang nantinya juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **5. Penutup**

### **5.1. Kesimpulan**

Meskipun nilai belanja fungsi pariwisata dinilai kecil jika dibandingkan belanja untuk pelayanan publik, ternyata belanja fungsi ini mampu menyokong perekonomian suatu daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja fungsi pariwisata pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi regional yang diukur dengan PDRB. Hal ini sesuai dengan kondisi yang dilaporkan oleh Kementerian Pariwisata bahwa kondisi kepariwisataan nasional tahun 2015 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB nasional sebesar 4,23 persen atau senilai Rp461,36 triliun (Kementerian Pariwisata, 2016).

Hal ini menjadi bahan evaluasi positif bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan sektor pariwisata yang meskipun kebijakannya tidak secara langsung bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi namun belanja fungsi pariwisata dapat dirasakan manfaatnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi pula. Kebijakan pembangunan pariwisata tersebut diantaranya diperuntukkan dalam: (1) penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; (2) peningkatan kualitas destinasi pariwisata; (3) peningkatan dan pengembangan industri pariwisata; (4) penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; (5) penguatan industri kreatif; (6) peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif; dan (7) peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif.

### **5.2. Rekomendasi**

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih jauh dampak belanja sektor pariwisata terhadap PDRB khusus untuk sektor pariwisata. Hal ini jika dilakukan maka akan terlihat seberapa besar dampak pengeluaran pemerintah di sektor tertentu dan seberapa besar dampaknya bagi sektor yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini, pemerintah dapat mengambil langkah untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di sektor pariwisata. Dengan optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut maka diharapkan hasil dari pembangunan pariwisata dapat diperoleh dampak positif bagi perekonomian nasional.

**Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2010. Jakarta.
- Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.
- Gujarati. 2004. Basic Econometrics. The McGraw-Hill Companies
- Hasan, T. Iskandar Ben dan Zikriah. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Bruto terhadap Penduduk Miskin Aceh. Jurnal Universitas Syiah Kuala
- J. Baumol, W & Alan S. Bhinder. 2003. Economics Principles and Policy Ninth Edition. United States Of America.
- Jhingan, M. L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. D. Guritno [penerjemah]. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia, Edisi II. Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta
- Kementerian Pariwisata. 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2015. Nota Keuangan APBN tahun 2015. Jakarta
- Kementerian Keuangan. 2015. Nota Keuangan APBN Perubahan tahun 2015. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Keempat. UPP STIM YKPN. Jakarta.
- Landau, D. 1983. "Government Expenditure and Economic Growth: A Cross Country Evidence". Southern Economic Journal, Volume 49 (7): 83-97.
- Lin, S.AY. 1994. "Government Spending and Economic Growth". Applied Economic. 26:83-94.
- Lukman, Lusiana. 2004. The Impact of Government Expenditure on Poverty Reduction in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.3, No. 1, April 2004 51-57, FE Unsyiah.
- Makrifah, S. A. 2009. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal [Tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mankiw, N. G. 2006. Teori Makro Ekonomi Edisi Keenam. Imam Nurmawan [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Norista, G. P. 2010. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah [Skripsi]. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Nurudeen, A. & Usman A. 2010. "Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 2008: A Disaggregate Analysis". *Business and Economics Journal*, Volume 2010 (BEJ-4): 1-11.
- Sukirno, S. 2004. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- World Bank. 2010. *Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah*. Edisi Lokakarya, Jakarta.